

KEGAGALAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN DAN ETIKA BISNIS PADA PT ASURANSI JIWASRAYA

Cintya Putri Nasution
Universitas Negeri Medan
Putricintya623@gmail.com

Suaini Mebia Putri
Universitas Negeri Medan
Suainiputri52@gmail.com

Dia Aulia Harahap
Universitas Negeri Medan
Diaaulia720@gmail.com

Rian Afrijal
Universitas Negeri Medan
Rianafrijalmunthe46@gmail.com

Article History:

Received: Januari 15, 2026;
Accepted: February 15, 2026;
Published: February 30, 2026;

Abstract. *This study aims to analyze the failure of Good Corporate Governance (GCG) implementation from the perspective of agency theory and business ethics at PT Asuransi Jiwasraya. This study uses a qualitative approach with a conceptual analysis method based on secondary data obtained from scientific journals, official reports, and relevant economic publications. The analysis results indicate that governance failure at PT Asuransi Jiwasraya is influenced by conflicts of interest between management and stakeholders, information asymmetry, moral hazard, and weak internal controls. Furthermore, the practice of non-transparent information presentation and imprudent investment decisions indicate that ethical business values have not been optimally internalized in the company's decision-making process. These findings confirm that the application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness has not been implemented substantively but rather tends to be formalistic. This failure not only impacts financial losses but also undermines public trust in the insurance industry. Therefore, this study demonstrates that successful GCG requires the integration of structural compliance, effective oversight, and the internalization of business ethics as the foundation of company operations.*

Keywords:

Good Corporate Governance, agency theory, business ethics, PT Asuransi Jiwasraya, public trust.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perspektif teori keagenan dan etika bisnis pada PT Asuransi Jiwasraya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konseptual berbasis data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi ekonomi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan

bahwa kegagalan tata kelola pada PT Asuransi Jiwasraya dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan, asimetri informasi, moral hazard, serta lemahnya pengendalian internal. Selain itu, praktik penyajian informasi yang tidak transparan dan keputusan investasi yang tidak prudent menunjukkan bahwa nilai-nilai etika bisnis belum terinternalisasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness belum berjalan secara substantif, melainkan cenderung formalistik. Kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan GCG membutuhkan integrasi antara kepatuhan struktural, pengawasan yang efektif, dan internalisasi etika bisnis sebagai landasan operasional perusahaan.

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan, khususnya industri asuransi, memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem ekonomi melalui fungsi pengelolaan risiko dan penghimpunan dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perusahaan dituntut untuk menerapkan prinsip etika bisnis serta Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. Penerapan GCG yang efektif terbukti mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Simadibrata, 2012).

Secara konseptual, etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku pelaku usaha agar tetap berada dalam koridor moral dan tidak merugikan pihak lain. Keberadaan etika bisnis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai fondasi dalam penerapan tata kelola perusahaan. Tanpa integrasi nilai etika yang kuat, implementasi GCG berpotensi bersifat formalitas semata dan tidak mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik bisnis (Falah, 2016). Fenomena kegagalan tata kelola dalam lembaga keuangan menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai etika dapat menyebabkan prinsip GCG tidak berjalan secara substansial, melainkan hanya bersifat administratif.

Dalam perspektif teori keagenan, hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemangku kepentingan sebagai prinsipal mengandung potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan serta ketimpangan informasi. Kondisi asimetri informasi ini membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik atau moral hazard, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik keagenan yang tidak terkendali dapat meningkatkan biaya keagenan dan menurunkan efisiensi perusahaan. Fenomena kegagalan pengelolaan dana dalam industri asuransi membuktikan bahwa konflik keagenan yang tidak diawasi secara efektif dapat mendorong manajemen mengambil keputusan berisiko tinggi yang tidak selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan.

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam keberlangsungan lembaga keuangan. Tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelolaan dana. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan dan kepercayaan publik di sektor keuangan (Adinegara dkk., 2021). Sebaliknya, berbagai fenomena kegagalan tata kelola dalam industri keuangan membuktikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas secara langsung berdampak pada penurunan kepercayaan publik.

Fenomena yang terjadi dalam industri asuransi di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam penerapan prinsip GCG dan etika bisnis. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, tetapi juga mencakup praktik pengelolaan investasi yang tidak prudent serta penyajian informasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah, termasuk mekanisme pelaporan pelanggaran yang tidak optimal, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan dalam

organisasi (Maharani dkk., 2022). Kondisi ini membuktikan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, penerapan GCG tidak mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang bersifat sistemik.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penerapan GCG dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi implementasi dan efektivitas pengawasan. Dalam banyak kasus, prinsip-prinsip tata kelola belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan regulasi dan pedoman tata kelola saja tidak cukup tanpa adanya komitmen etika dan pengawasan yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan penerapan etika bisnis dan prinsip Good Corporate Governance dalam lembaga keuangan dengan menggunakan perspektif teori keagenan dan etika bisnis. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena kegagalan tata kelola dapat memperkuat relevansi teori keagenan serta menunjukkan pentingnya integrasi etika dalam penerapan GCG, serta implikasinya terhadap kepercayaan publik dan stabilitas industri keuangan secara lebih luas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada analisis konseptual, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan tata kelola perusahaan melalui sudut pandang teori keagenan dan etika bisnis. Pendekatan ini tidak berfokus pada pemaparan peristiwa secara deskriptif, melainkan pada upaya menafsirkan dan menjelaskan fenomena berdasarkan kerangka teori yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta publikasi ekonomi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kecenderungan umum yang berkaitan dengan praktik etika

dan penerapan tata kelola perusahaan di sektor keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka, yaitu dengan menelaah dan mengevaluasi berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan konsep etika bisnis, teori keagenan, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian diseleksi dan disusun sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah, yaitu mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema utama, menginterpretasikan temuan dengan menggunakan pendekatan teoretis, serta merumuskan kesimpulan yang bersifat analitis. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan konsep dengan fenomena secara lebih mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga bersifat konseptual. Untuk menjaga keandalan hasil penelitian, dilakukan perbandingan antar sumber guna memastikan konsistensi informasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan tata kelola dan etika dalam lembaga keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegagalan Tata Kelola dalam Perspektif Teoretis

Fenomena kegagalan pemenuhan kewajiban pada PT Asuransi Jiwasraya mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara strategi penghimpunan dana dan pengelolaan investasi. Penawaran imbal hasil tinggi tanpa diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai menunjukkan adanya praktik pengambilan keputusan yang tidak *prudent*. Fenomena ini dianalisis dalam perspektif teori keagenan dan etika bisnis untuk menjelaskan kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* dalam industri asuransi. Selain itu, adanya distorsi informasi melalui penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya mengindikasikan kelemahan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas (BPK, 2020; CNN Indonesia, 2020).

Kondisi tersebut membuktikan bahwa kegagalan tata kelola bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan manajerial yang tidak sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, fenomena ini memperkuat pandangan bahwa implementasi GCG yang tidak substantif cenderung gagal dalam mencegah risiko jangka panjang.

2. Analisis Pelanggaran Etika dalam Perspektif Teori

Dalam perspektif etika bisnis normatif, perusahaan dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjalankan aktivitasnya (Velasquez, 2012). Namun, fenomena manipulasi laporan keuangan menunjukkan adanya pelanggaran PT Asuransi Jiwasraya terhadap prinsip kejujuran (*honesty*), karena informasi yang disampaikan kepada publik tidak merepresentasikan kondisi perusahaan secara aktual. Kondisi ini membuktikan bahwa etika bisnis tidak diinternalisasikan sebagai nilai dasar dalam organisasi, melainkan hanya diposisikan sebagai formalitas. Akibatnya, informasi yang disajikan menjadi misleading dan berpotensi memengaruhi keputusan ekonomi pemangku kepentingan secara tidak rasional.

Kegagalan dalam mengungkap risiko investasi kepada nasabah mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan tanggung jawab moral perusahaan. Menurut Boatright (2014), perusahaan memiliki kewajiban etis untuk menyampaikan informasi yang lengkap dan akurat kepada stakeholder. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa asimetri informasi dimanfaatkan oleh manajemen untuk kepentingan tertentu, yang pada akhirnya merugikan pihak lain.

Dalam kerangka teori keagenan, kondisi ini memperlihatkan adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan nasabah sebagai prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa konflik tersebut dapat memicu moral hazard apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Fenomena pengambilan keputusan investasi

berisiko tinggi tanpa mempertimbangkan kepentingan nasabah membuktikan bahwa konflik keagenan dalam organisasi tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, pelanggaran etika yang terjadi tidak hanya bersifat individual, tetapi telah menjadi bagian dari pola organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kegagalan etika bisnis berkontribusi langsung terhadap lemahnya penerapan tata kelola perusahaan.

3. Analisis Kegagalan Good Corporate Governance (GCG)

Kegagalan tata kelola dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip GCG yang dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2015), yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Pada aspek transparansi, penyajian laporan keuangan yang tidak akurat menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menyediakan informasi yang dapat dipercaya. Hal ini membuktikan bahwa transparansi tidak dijalankan secara substantif, sehingga mengurangi kualitas pengambilan keputusan oleh stakeholder.

Pada aspek akuntabilitas, lemahnya fungsi pengawasan internal seperti dewan komisaris dan komite audit menunjukkan bahwa manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) yang menekankan pentingnya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dalam struktur organisasi. Pada aspek responsibilitas, ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab fiduciary. Fenomena ini membuktikan bahwa orientasi pengelolaan perusahaan tidak berfokus pada kepentingan pemangku kepentingan.

Pada aspek independensi, adanya indikasi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan investasi menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak bebas dari pengaruh pihak tertentu. Hal ini memperkuat argumen bahwa struktur tata kelola belum mampu menjaga objektivitas

dalam pengelolaan perusahaan. Pada aspek fairness, kerugian yang dialami nasabah menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlakuan terhadap stakeholder. Kondisi ini membuktikan bahwa prinsip keadilan belum diterapkan secara optimal dalam praktik bisnis.

Tabel 1. Kegagalan GCG Berdasarkan Prinsip

Prinsip GCG	Temuan Fenomena	Implikasi Teoritis
Transparansi	Laporan keuangan tidak akurat	Lemahnya keterbukaan informasi
Akuntabilitas	Pengawasan internal tidak optimal	Kegagalan pertanggungjawaban
Responsibilitas	Gagal memenuhi kewajiban nasabah	Pelanggaran tanggung jawab fiduciary
Independensi	Konflik kepentingan dalam investasi	Lemahnya objektivitas keputusan
Fairness	Nasabah mengalami kerugian	Ketidakstabilan terhadap stakeholder

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegagalan pada PT Asuransi Jiwasraya mencakup seluruh prinsip GCG secara sistemik. Hal ini memperkuat temuan Claessens dan Yurtoglu (2013) bahwa lemahnya penegakan menjadi faktor utama kegagalan tata kelola di negara berkembang.

4. Kritik terhadap Sistem Pengawasan dan Regulasi

Fenomena kegagalan tata kelola dalam PT Asuransi Jiwasraya juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam efektivitas pengawasan oleh regulator. Secara teoretis, sistem pengawasan seharusnya bersifat preventif dan berbasis risiko (risk-based supervision), sehingga mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Namun, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa pengawasan cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah permasalahan berkembang menjadi krisis. Hal ini membuktikan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang dirancang dengan implementasi di lapangan.

Menurut Arner, Barberis, dan Buckley (2017), efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kemampuan regulator dalam memanfaatkan

informasi secara cepat dan akurat. Fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa sistem pengawasan belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Dengan demikian, kegagalan tata kelola tidak hanya terjadi pada tingkat perusahaan, tetapi juga mencerminkan perlunya penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh.

5. Implikasi terhadap Kepercayaan Publik dan Stabilitas Keuangan

Kegagalan tata kelola pada PT Asuransi Jiwasraya memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan karena memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan (Guiso, Sapienza, & Zingales, 2008). Penurunan kepercayaan akibat kegagalan tata kelola menunjukkan bahwa integritas perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas industri.

Fenomena ini membuktikan bahwa pelanggaran etika dan lemahnya penerapan GCG tidak hanya berdampak pada satu entitas, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi terhadap industri secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Selain itu, ketidakmampuan dalam mendeteksi permasalahan sejak dini juga memperkuat persepsi negatif terhadap efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik memerlukan upaya yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, melalui penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Asuransi Jiwasraya mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan perusahaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam perspektif teori keagenan, fenomena ini menunjukkan adanya konflik

kepentingan antara manajemen sebagai agen dan nasabah sebagai prinsipal yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga memicu terjadinya moral hazard. Sementara itu, dari sudut pandang etika bisnis, pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan dan penyajian informasi yang tidak transparan membuktikan bahwa nilai-nilai etika belum terinternalisasi secara optimal dalam organisasi. Kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness menunjukkan bahwa implementasi GCG masih bersifat formal dan belum substantif.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan secara luas. Dengan demikian, kasus PT Asuransi Jiwasraya membuktikan bahwa keberhasilan penerapan tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada integrasi nilai etika dan efektivitas sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui penguatan implementasi GCG yang berbasis nilai etika, peningkatan kualitas pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan regulasi yang konsisten. Langkah tersebut menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga stabilitas industri keuangan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Adinegara, G. N. J., dkk. (2021). The effect of good corporate governance on the market value of financial sector companies in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2911921&val=25556>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss3/2/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan hasil pemeriksaan investigatif atas pengelolaan keuangan dan dana*

investasi pada PT Asuransi Jiwasraya. Jakarta: BPK RI.
<https://www.bpk.go.id>

Boatright, J. R. (2014). *Ethics and the conduct of business* (7th ed.). Pearson.

Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey. *Emerging Markets Review*, 15, 1–33.
<https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002>

CNN Indonesia. (2020). *Kronologi kasus Jiwasraya, dari gagal bayar hingga dugaan korupsi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>

Falah, N. (2016). Etika bisnis pelengkap corporate governance syariah. *Jurnal Misykat*, 1(1).
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=876040&val=13923>

Guiso, L., Sapienza, P., & Zingales, L. (2008). Trusting the stock market. *The Journal of Finance*, 63(6), 2557–2600. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01408.x>

Hariyani, J. R., Indriasari, I., & Ervina, R. H. (2024). Pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan periode 2021–2023. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship*, 2(4).
<https://doi.org/10.70248/jmie.v2i4.2716>

Indryani, A. P., Salsabila, A. D., Setyawan, N. D., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2024). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor consumer services tahun 2021–2023. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28610>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

Kartika, N., Fikri, R. A., Badzlin, M. Z., Nabila, Z., & Fadila, A. D. (2024). Violation of good corporate governance principles by the board of directors in corporate law: A case analysis of PT Asuransi Jiwasraya (Persero). *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.53695/injects.v6i1.1494>.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG. <https://knkg.or.id>

- Maharani, A. D., dkk. (2022). Analisis penerapan whistleblowing system guna menciptakan good corporate governance pada perusahaan BUMN bidang asuransi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3386456&val=29715>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>
- Putri, F. A., Friyani, R., & Wijaya, R. Z. (2023). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan firm size terhadap kinerja keuangan BUMN di BEI tahun 2021–2023. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.56916/jimab.v4i2.1775>
- Simadibrata, T. (2012). Peranan good corporate governance terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=113961&val=5211>
- Simbolon, L., Muda, I., & Batubara, B. M. (2023). Evaluasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(2).
- Velasquez, M. G. (2012). *Business ethics: Concepts and cases* (7th ed.). Pearson.